

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan tidak hanya mewujudkan potensi dirinya, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kapasitasnya untuk bertindak guna mengubah iklim politik ke arah yang lebih sehat dan bermoral. Semangat dasar pendidikan politik adalah menumbuhkan kader-kader politik perempuan yang tangguh. Kader politik perempuan dianggap perlu jika memiliki basis akar rumput. Ini seringkali menjadi kelemahan utama politisi perempuan. 30% keterwakilan perempuan hanya memperjuangkan kelas menengah ke atas, tidak cukup kader yang siap menjadi pejuang politik memperjuangkan aspirasi rakyat. Kader politik perempuan jarang memiliki basis sosial. Namun hal itu baru diketahui saat agenda pilkada, atau karena kebetulan dalam keluarga seorang tokoh terkemuka. Selain itu, potensi perempuan yang mendominasi pada bidang belum diajak berpartisipasi dan diperlukan untuk menguatkan posisinya di politik.¹

Perempuan menghadapi banyak tantangan dan kendala ketika berpartisipasi dalam kegiatan publik. Secara umum, sulit bagi mereka untuk memasuki bidang politik. Selain masalah ekonomi, perempuan disebut basis sosialnya lemah. Situasi ini kemudian menciptakan bias sosial terhadap ketidaksetaraan gender di ruang publik. Perempuan kurang terwakili di legislatif. Akibatnya, aspirasi perempuan kurang mendapat perhatian dalam merumuskan kebijakan publik yang peka gender. Banyak perempuan yang tidak begitu tertarik dengan kegiatan politik sehingga enggan menjadi anggota partai politik. Politik dianggap kotor dan milik laki-laki. Padahal, politik bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga ruang perumusan kebijakan pemerintah. Agar dapat terwujud kesejahteraan rakyat yang termasuk adil. Perlu strategi supaya perempuan minat untuk ke perpolitikan dengan menjadi anggota partai politik, dan menjadi kader yang aktif pada kegiatan partai yang juga menjadi pengurus partai politik.²

¹ Achmad Soeharto, "Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan," *E-Journal.Iainpekalongan.Ac.Id* 3, no. 1 (2011): 331, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/7>.

² Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Agastya: Jurnal Sejarah*

Kader adalah orang-orang terlatih dan disiapkan oleh organisasi, sehingga kader memiliki pemahaman yang lebih baik tentang organisasi daripada orang biasa. Jika suatu organisasi melalui proses kaderisasi dengan cara mendidik dan membina kader, namun tidak dapat membuktikan bahwa kader tersebut lebih baik dari rata-rata orang, maka dapat dikatakan kaderisasi tersebut belum berhasil. Jadi kelahiran kembali yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, karena melalui kelahiran kembali seharusnya dapat menghasilkan manusia berkualitas yang pemikiran dan praktiknya lebih unggul dari orang awam.³

Peran kader perempuan dalam partai sangat dibutuhkan, sehingga partisipasi politiknya harus dihargai. Marginalisasi gender dalam pemerintahan merupakan masalah yang memerlukan tindakan nyata untuk mengatasinya, dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan politik yang murni untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan agar dapat berperan lebih besar di arena politik, perempuan berperan dalam mengembangkan demokrasi dan secara bijaksana memutuskan posisi politiknya.⁴

Pendidikan merupakan sarana peningkatan kualitas kepribadian sehingga memiliki peran strategis baik secara intelektual maupun moral. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dianggap penting bagi manusia, sedangkan pendidikan politik adalah proses mempelajari dan memahami hak, tugas, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Institusi pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah juga berpotensi untuk meningkatkan daya saing bangsa.⁵

Istilah pendidikan politik berasal dari bahasa Inggris yakni, *Political socialization* yang berarti sosialisasi politik. Menengok kembali berbagai literatur politik yang ada, pendidikan politik

Dan Pembelajarannya 6, no. 1 (2016): 32, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>.

³ Nursal, "Peran Pimpinan Dalam Kaderisasi Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru," *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 3.

⁴ Sindi Novianti et al., "Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender Dalam Pemerintahan," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 1 (2022): 44.

⁵ Bayu Adi Laksono, "The Community Empowerment Through Social and Educational Institutions," *Jurnal Pendidikan Humaniora* 6, no. 3 (2018): 115–22, <https://doi.org/10.3390/su13169217>.

termasuk dalam proses sosialisasi politik, meskipun ditulis secara berbeda, sosialisasi politik dan pendidikan politik pada prinsipnya memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Oleh karena itu, dalam artikel ini, sosialisasi politik dan pendidikan politik digunakan bersama tanpa kontroversi. Alex Victor Wanma mengutip perkataan Rusadi Kantaprawira bahwa pendidikan politik adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik. Sebagaimana dipahami dalam kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu memenuhi kewajiban partisipasinya.⁶

Pendidikan politik dilakukan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan politik partai tidak hanya untuk melatih kader menjadi politisi yang loyal terhadap partai, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang yaitu membentuk sikap yang bijaksana, sikap dan perilaku dalam menghadapi berbagai persoalan Politik yang bijak, isu nasional. Pendidikan politik partai memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara khususnya kader partai agar memiliki kepribadian politik, kesadaran politik, dan kemampuan berpartisipasi aktif, karena kader merupakan bagian dari aktor politik yang sebenarnya terlibat dalam transfer kekuasaan publik. Khusus bagi kader perempuan, pendidikan politik di dalam partai dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan partisipasi politik kader perempuan di partai dan pemerintahan. Partai politik memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan internal partai politik dan legislatif, karena pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki.⁷

Kader dengan pendidikan formal yang lebih tinggi didukung oleh pendidikan nonformal seperti pendidikan politik yang baik akan lebih mau berpartisipasi aktif dalam bidang politik yang didalamnya akan terjadi proses transmisi nilai dan pengetahuan yang akan mentransformasi masyarakat, persepsi budaya patriarki dan kendala lain yang sering menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Pendidikan politik diharapkan menjadi alat atau media pembelajaran politik publik, sehingga melahirkan partisipasi politik perempuan

⁶ Alex Victor Wanma, "Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Nnumfor," n.d.

⁷ Hariyanti, Cecep Darmawan, and Iim Siti Masyitoh, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 75–76, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>.

dan keterwakilan perempuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, serta membangkitkan nasionalisme di kalangan warga negara. Pendidikan politik penting bagi setiap partai politik untuk terus mendidik perempuan, mengingat temuan beberapa penelitian bahwa perempuan seringkali dianggap kurang cocok dengan politik karena pengaruh budaya patriarki masih kuat karena dunia politik dianggap keras. dan hal ini tetap menjadi hambatan yang sangat besar yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik, partisipasi dan partisipasi perempuan dalam politik, sehingga proses penyadaran politik perempuan harus terus berjalan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.⁸

Sayap partai diidentifikasi sebagai kelompok berkepentingan (*interest group*) yang ada di negara-negara pada umumnya. Dari segi organisasi politik, partai politik dan organisasi sayap memiliki kesamaan. Tercatat setidaknya ada tiga kesamaan antara partai politik dan organisasi sayap politik, pertama keduanya merupakan organisasi di luar sektor privat dan publik, kemudian yang kedua dipandang mencari dukungan politik karena konstituensi atau alasan, sedangkan yang ketiga adalah partai politik dan organisasi sayap pada umumnya menjalankan urusan organisasi dengan cara menggalang dukungan dan anggota, mencari simpati dan pengaruh politik untuk kepentingan elektoral, dan seperti halnya organisasi, semua itu berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidup organisasi. Salah satu organisasi sayap partai yaitu Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) yang merupakan sayap partai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara.⁹

Contoh partai politik yang menerapkan pendidikan politik perempuan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak. Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dirasakan tidak optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendidikan politik bagi perempuan

⁸ Siti Hajar, "Fungsi Media Dan Partai Politik Di Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 555, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.452>.

⁹ Rosa Ristawati and Radian Salman, "Partai Politik Dan Organisasi Sayap Di Indonesia: Fungsi Dan Pengaturannya," *Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, 2019, 3–4.

yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak di mana masih mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak selama ini hanya karena ada kepentingan untuk menggalang massa dan masih bersifat insidental atau tidak secara kontinyu.¹⁰

Selain itu, contoh penerapan pendidikan politik lainnya datang dari Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sinjai. Bentuk-bentuk pendidikan politik yang digunakan di PKS Kabupaten Sinjai berupa pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan. Pelaksanaan pendidikan politik bersifat terencana, teratur dan kondisional.¹¹

Partisipasi kader perempuan dalam politik tidak perlu didefinisikan secara kaku, yang disebut dengan partisipasi dalam politik berarti kader perempuan terlalu berambisi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bupati, wakil bupati, presiden, dan wakil presiden. pemilihan Presiden. Partisipasi politik merupakan perwujudan kepribadian politik perempuan dan kesadaran politik dalam menjalankan hak-hak politiknya. Bentuk kader perempuan yang mengikuti partai politik memiliki latar belakang yang lebih luas yaitu, ikut serta dalam melancarkan program/kegiatan partai; ikut aktif dalam program/kegiatan partai; ikut serta dalam debat untuk menentukan kebijakan/sikap partai; ikut aktif dalam kepengurusan partai; ikut serta dalam keberhasilan rencana partai; menjadi calon anggota legislatif/ kepala daerah atau wakil kepala daerah/ calon

¹⁰ Tenti Omami, "Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Menurut Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2017, 24.

¹¹ Ilmar Andi Achmad et al., "Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal (Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera)," *Journal of Education Sciences* 1, no. 1 (2022): 35, <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>.

presiden atau wakil presiden; melakukan fungsi-fungsi partai dengan sosialisasi politik dan memberi pencerahan pada masyarakat.¹²

Dalam praktiknya, partai politik masih cenderung melihat perempuan sebagai penggalang dan pencari keuntungan dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan pemilu. Padahal, kehadiran perempuan di partai politik membawa hak dan kewajiban yang sama, termasuk peluang untuk menang dalam persaingan.¹³

Sayap partai Wanita Persatuan Pembangunan adalah salah satu sayap Partai Persatuan Pembangunan yang didalamnya terdapat perempuan yang membangun dan mempersatukan umat Islam, khususnya perempuan yang berbasis Islam, bertujuan untuk bersatu dengan perempuan melalui berbagai kegiatan untuk memajukan kegiatan perempuan dalam perjuangan melalui partai politik, sehingga memberdayakan perempuan harkat dan martabat perempuan, peran wanita dalam peningkatan kualitas wanita, yaitu melalui kegiatan pengajian harian, bansos pada momen-momen tertentu dan donor darah.¹⁴ Tugas yang ada di Wanita Persatuan Pembangunan seperti: Training of trainers (TOT); Pelatihan Kewirausahaan; Pengajian; Bakti sosial dan membantu penggalangan dana untuk penanggulangan bencana; Pelatihan regenerasi; Lokakarya untuk caleg perempuan di seluruh Indonesia.¹⁵

Di Kabupaten Jepara, Pimpinan Cabang Wanita Persatuan Pembangunan (PC WPP) Kabupaten Jepara menyelenggarakan acara pendidikan politik perempuan bersama DPC PPP Jepara. WPP Jepara merupakan salah satu badan otonom Partai Persatuan Pembangunan dan beranggotakan di seluruh kecamatan se-Jepara. Untuk meningkatkan kualitas politik kader, WPP Jepara memiliki

¹² Widdy Yuspita Widiyaningrum, "Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis," *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 4, no. 2 (2020): 138–139, <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>.

¹³ Ngudi Astuti, "Pendidikan Politik Bagi Perempuan," *Media Indonesia*, 2020, <https://mediaindonesia.com/opini/339396/pendidikan-politik-bagi-perempuan>.

¹⁴ Ahmad Anwar, "Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2020" (IAIN Kudus, 2022), 44.

¹⁵ Evi Yunita Kurniaty et al., "Peran Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan Di Partai Persatuan Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 3, no. 2 (2016): 176, <https://doi.org/10.31219/osf.io/g83pb>.

banyak proyek pendidikan politik. Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh WPP Jepara ini dilaksanakan pasca pandemi covid-19 dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta di seluruh kabupaten Jepara.

Menurut Hj. Siti Malichah, Ketua WPP Jepara, kader perempuan harus memiliki wawasan politik yang mumpuni agar dapat berperan dengan baik dan siap hadir dalam setiap kebijakan politik. Dengan kegiatan yang diadakan dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, diharapkan peran Wanita dalam kancan perpolitikan lebih meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik penting untuk keterlibatan kader perempuan dalam dunia perpolitikan.¹⁶

Partai politik adalah tempat untuk belajar dan memahami politik yang baik dan nyata. Dalam partai politik, gaya hidup politik yang demokratis dan beretika akan diajarkan kepada anggota partai. Partai politik juga akan memberikan pemahaman tentang sistem politik Indonesia dan cara kerjanya. Oleh karena itu pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kualitas kader partai, karena partai politik memegang peranan penting dalam membangun masyarakat yang berbudaya politik.¹⁷

Proses pendidikan yang dilakukan melalui partai menitikberatkan pada penanaman pengetahuan moral dan politik. Proses pendidikan kader yang dimaksud adalah bentuk penguatan tanggung jawab politik dan ideologi kader. Selain itu, sistem pengkaderan juga digunakan untuk memperkuat sistem di dalam partai, dan sudah dipersiapkan cukup lama. Kaderisasi harus dilakukan secara terus menerus agar terciptanya kader yang kuat dalam tubuh partai tersebut. Diharapkan kaderisasi yang dilakukan partai dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan tidak hanya dapat meneruskan perjuangan partai, namun juga dapat membawa

¹⁶ Kabarpersatuan.com, "Tingkatkan Kualitas Kader, WPP Jepara Adakan Pendidikan Politik Perempuan," Kabarpersatuan.com, 2022, <https://kabarpersatuan.com/2022/06/29/tingkatkan-kualitas-kader-wpp-jepara-adakan-pendidikan-politik-perempuan/>.

¹⁷ Dhemas Fatur Rachman, "Partai Politik Dan Peran Pentingnya Dalam Sistem Politik Di Indonesia," Kompasiana.com, 2023, <https://www.kompasiana.com/dhemasftr/644a2d6308a8b540a934f752/partai-politik-dan-peran-pentingnya-dalam-sistem-politik-di-indonesia>.

perubahan dalam sistem perpolitikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya.¹⁸

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Pendidikan politik pada WPP Jepara dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kader dalam pemahaman politik. Hal ini lah yang menambah wawasan politik kader WPP Jepara dan bermanfaat kedepannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik buat meneliti permasalahan mengenai **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK WANITA PERSATUAN PEMBANGUNAN (WPP) KABUPATEN JEPARA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN POLITIK KADER”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi pendidikan politik oleh Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Kabupaten Jepara sebagai banom dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meningkatkan kualitas kader dalam pemahaman politik. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) ini adalah banom dari Partai Persatuan Pembangunan. Fokus pendidikan politik yang diteliti adalah WPP Kabupaten Jepara pasca pandemi yang diadakan di gedung DPC PPP Jepara.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang ruang lingkup masalah yang akan dipertimbangkan, dan berdasarkan identifikasi masalah, setelah penulis memberikan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pemahaman politik kader?

¹⁸ Abdul Hadi, “Manajemen Pengkaderan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta Priode 2011 – 2016 Dalam Rangka Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 5.

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pemahaman politik kader?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pemahaman politik kader.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pemahaman politik kader.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk pembaca secara akademik dan praktis.

1. Secara Akademik

Penelitian secara akademik, penulis berharap bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik, dan penulis berharap pembaca bisa menjadikan skripsi ini sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik, karena kader partai harus memiliki wawasan politik yang mumpuni, sehingga dapat menjalankan perannya secara maksimal dan siap tampil dalam setiap kebijakan politik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk dapat mempermudah gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga dapat membentuk penelian secara sistematis dan ilmiah. Dalam skripsi ini terdiri dari tiga sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini diawali dengan, sampul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Tengah

Ada tiga bab dalam bagian ini, dan setiap bab merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, maka bab tersebut terhubung satu sama lain, tiga bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ke dua ini memuat uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang tengah dipelajari. Kerangka teori yang akan digunakan yaitu tentang pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara sebagai kader perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lokasi dan waktu penelitian merupakan setting penelitian. Kemudian tercantum subyek penelitian yang berfungsi sebagai sumber utama data penelitian ini, selain itu terdapat sumber data, metode pengumpulan data, pengujian validitas data, dan metode analisis data semuanya yang tercakup dalam bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan, dan saran untuk menjadikan penelitian ini berkelanjutan.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka yang terdiri dari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penulis, untuk melengkapi data penelitian, lampiran juga disertakan di bagian ini.

